

# STUDI PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH MUHAMMADIYAH DI SURABAYA

Rusman, M.Pd.I, M. Wahid Nur Tualeka  
(FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya)

## Abstrak

Kepopuleran persyarikatan muhammadiyah dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan memang sudah tidak diragukan lagi, bahkan diantara sekolah-sekolah negeri dan swasta, Muhammadiyah selalu menempati urutan pertama dalam kepercayaan masyarakat saat memilih sekolah bagi anaknya. Dampak kepercayaan tersebut mengakibatkan jumlah lembaga pendidikan muhammadiyah semakin banyak, sebagai konsekuensi logis akan jumlahnya yang banyak maka pengelolaan pendidikan yang dilakukan pun memiliki ragam yang berbeda antar satu sama lain. Bahkan tidak jarang terjadi ketimpangan pengelolaan pendidikan yang berakibat pada maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh muhammadiyah. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar yang selalu menempatkan pendidikan sebagai sebuah amal usahanya yang diunggulkan. Diakui atau tidak, sistem pengelolaan pendidikan Muhammadiyah saat ini belum memiliki pedoman atau sistem pengelolaan pendidikan secara konseptual. Selama ini pengelolaan pendidikan muhammadiyah baru sebatas berpedoman pada sebuah kepanjangan regulasi pemerintah dalam bidang pendidikan. Sehingga sistem pengelolaan pendidikan Muhammadiyah tidak mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Berangkat dari persoalan ini, tujuan penelitian ini adalah berusaha mendeskripsikan sistem pengelolaan pendidikan muhammadiyah di surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan telaah kepustakaan. Lokasi penelitian adalah di SMA Muhammadiyah 2 dan SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, Siswa dan Tokoh masyarakat sekitar. Analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif berdasarkan fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Fenomena sosial akan dianalisa dari berbagai pendekatan keilmuan (multidisiplin), sehingga analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah tergantung dari data yang didapat oleh peneliti dilapangan, melalui metode tersebut diharapkan dapat menemukan dan menggambarkan pengelolaan pendidikan muhammadiyah di surabaya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Prinsip pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah surabaya bersumber pada tiga pokok utama yaitu sekolah muhammadiyah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan dan unggul sebagai *center of excellence*, sebagai *agent of change*, dan sebagai kebun ilmu tempat siswa menuntut ilmu, 2. Lingkup pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah meliputi beberapa hal berikut : Aspek manajemen, aset yang dimiliki, pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum, Proses pembelajaran, Evaluasi, Sarana dan prasarana, dan penataan lingkungan, 3. Alur pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah diawali dari peserta didik yang kemudian melalui tahapan proses pembelajaran ( Pendidik, Kurikulum, Bahan Ajar, Sarana Prasarana, Pendanaan Pendidikan dan Peran Masyarakat ) dengan keterlibatan 6 komponen tersebut dalam proses akan menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul, 4. Tantangan pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah terangkum dalam empat hal yakni Globalisasi, Ketidakpastian, Kompetensi dan Politisasi Pendidikan.

**Kata Kunci :** *Sistem Pengelolaan, Pendidikan menengah Muhammadiyah,*

## **A. Pendahuluan**

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat islam terbesar di Indonesia memiliki jumlah amal usaha yang begitu banyak. Diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, dan yayasan sosial. Khusus, di bidang pendidikan muhammadiyah tercatat memiliki jumlah TK atau PTQ berjumlah 4623, SD/MI 2.604, SMP/MTS 1772, SMA/sMK/MA 1143, Ponpes 67, dan perguruan tinggi 172. Keseluruhan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. (*republika.com/2/08/2015*).

Jumlah amal usaha muhammadiyah bidang pendidikan yang sangat banyak menjadikan kebanggaan sekaligus kesedihan tersendiri. Di satu sisi banyaknya jumlah lembaga pendidikan muhammadiyah memberikan harapan besar bagi kemajuan persyarikatan. Disisi lain banyaknya jumlah lembaga pendidikan yang dikelola mengakibatkan konsentrasi dalam pemerataan pendidikan menjadi terkendala. Bahkan tak jarang jarak kualitas antara sekolah muhammadiyah yang terkelola dengan baik dan yang dikelola asal-asalan menjadi sangat terlihat.

Bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah muhammadiyah terkenal memiliki kualitas yang unggul, sudah menjadi buah bibir dikalangan masyarakat muhammadiyah atau non muhammadiyah. Unggul tidaknya suatu institusi pendidikan terletak pada pola organisasinya dan Muhammadiyah menempatkan pendidikan sebagai sebuah amal usahanya yang diunggulkan. Karena pertama kali berdiri muhammadiyah bergerak dalam dunia pendidikan, namun akhir-akhir ini di beberapa daerah system pendidikan Muhammadiyah sangat stagnan dan berdampak pada pola kaderisasi yang semakin menurun. Yang ditandai dengan semakin stagnannya perkembangan organisasi, melemahnya kaderisasi dan rapuhnya organisasi terhadap masuknya pola pemikiran baru yang bertentangan dengan khittah muhammadiyah yang merasuki kader mudanya dan semakin kentalnya nuansa politik dalam organisasi pendidikan serta berdampak pada perkembangan dunia pendidikan.

Kemampuan *survive* lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari model pendidikan Muhammadiyah yang didasarkan pada nilai-nilai berikut:

1. Pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ruhul ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, menjadi dasar inspirasi dalam ikhtiar mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan.
2. Menerapkan prinsip kerjasama (*musyarokah*) dengan tetap memelihara sikap kritis, baik pada masa Hindia Belanda, Dai Nippon (Jepang), Orde Lama Orde Baru, hingga masa sekarang ini.
3. Memelihara prinsip pembaruan (*tajdid*) dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan.
4. Memiliki kultur memihak pada kaum yang mengalami kesengsaraan (*dhuafa dan mustadh'afin*) dengan melakukan proses-proses kreatif.
5. Memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan (*tawasuth atau moderat*) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. (*kompasiana.com/13/04/2013*)

Dalam menjalankan suatu lembaga pendidikan, dibutuhkan suatu usaha pengelolaan yang baik. Mengelola lembaga pendidikan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang sulit karena harus memikirkan semua aspek yang terlibat didalamnya. Masalah bisa saja muncul setiap saat, mulai dari sistem pembelajaran yang meliputi mempersiapkan sarana dan prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses pembelajaran. Hal inilah yang harus benar-benar dikelola dengan baik agar arah dan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.

Dalam kata lain pengelolaan adalah manajemen. Manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Istilah manajemen biasa dikenal dalam ilmu ekonomi yang memfokuskan pada profit (keuntungan) dan komoditas komersial (Muhaimin, 2009: 4).

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah pengaturan wewenang dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan

satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, manajemen pendidikan dalam hal ini berupaya untuk mengoordinasikan semua elemen pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai barometer jalan tidaknya sistem pengelolaan pendidikan di Muhammadiyah, Perhatian dan komitmen Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidak pernah surut. hal ini nampak dari keputusan-keputusan persyarikatan yang dengan konsisten dalam setiap muktamar (sebagai forum tertinggi persyarikatan Muhammadiyah) senantiasa ada agenda pembahasan dan penetapan program lima tahunan bidang pendidikan, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dalam lima belas tahun terakhir (tiga kali muktamar) dapat dilihat bahwa Muhammadiyah senantiasa memiliki agenda yang jelas serta memiliki ukuran yang jelas berkenaan dengan program-program pendidikan Muhammadiyah. (*solomoncell.wordpress.com/4/6/2012*).

Dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan Muhammadiyah. Setidaknya ada beberapa langkah yang mungkin patut untuk diperhatikan :

*Pertama*, pembenahan sumber daya manusia (Kepala sekolah-guru-murid), yang salah satunya dengan meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan kepala sekolah dan guru, serta memposisikan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar-mengajar.

*Kedua*, kurikulum. Muhammadiyah perlu membuat kurikulum tersendiri. Mengapa harus berbeda dengan kurikulum pendidikan nasional? Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai lembaga pendidikan paling banyak dan paling lengkap dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian, Muhammadiyah harus mulai "menyapih diri" dari pemerintah berkaitan dengan kurikulum. Karena pendidikan Muhammadiyah juga merupakan pendidikan pengkaderan bagi keberlangsungan Muhammadiyah kedepan.

*Ketiga*, pembenahan dan pengadaan sarana-prasarana, seperti gedung yang representatif, laboratorium yang memadai, perpustakaan yang mempunyai koleksi lengkap, meja-kursi, dan lain sebagainya. Dengan sarana-prasarana yang memadai dan lengkap, tentunya akan menujuang proses pembelajaran sehingga menghasilkan kualitas yang baik pula. Namun perlu diingat jangan sampai dengan dalih pengadaan sarana-

prasarana, lembaga pendidikan Muhammadiyah memasang "bandrol" mahal bagi siswa atau peserta didik baru yang hendak sekolah atau menempuh pendidikan di lembaga tersebut.

*Keempat*, perbaikan manajemen sekolah. Manajemen sekolah disini tidak hanya pada agenda administratif saja, namun peraturan sistem penyelenggaraan sekolah (pendidikan) Muhammadiyah. Yakni tidak terus langsung mengadopsi konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) milik pemerintah begitu saja, namun sekolah Muhammadiyah harus mempertimbangkan aspek kelokalan (*local wisdom*). Karena itu, Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen perlu membuat panduan teknis pelaksanaan manajemen sekolah Muhammadiyah secara konseptual.

Jika kita telaah secara mendalam bahwa sistem pendidikan di Muhammadiyah yang ada sekarang lebih condong kepada sistem Liberal di satu sisi dan disisi lain sistem konservatif. Sistem liberal dalam pengelolaan sekolah dan sistem konservatif dalam sistem pengajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan liberal lebih memecahkan masalah pendidikan dengan usaha "*Reformasi Kosmetik*" (Pendidikan Populer) yang lebih menekankan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah serta berbagai usaha untuk meningkatkan rasio murid-guru.

Sedangkan sistem pendidikan konservatif adalah sebuah sistem pendidikan yang seperti dikatakan diatas (sorogan dan weton) menempatkan murid berada dalam kebodohan absolut dan guru dalam kebenaran absolut sehingga murid tidak diperkenankan untuk berpikir, hanya menerima pelajaran dari si guru dan ini merupakan sebuah kemapanan yang harus di pertahankan. Jika boleh meminjam istilah yang diperkenalkan paulo freire, sistem yang banyak digunakan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah "*Banking Concept of Education*" (konsep pendidikan Bank)", yang akan mematikan potensi kreatifitas berpikir subjek didik, dan posisi subjek didik hanya sebagai gudang penyimpanan (Banking Concept) yang tidak tahu untuk apa barang yang disimpan digudang otak mereka. ([solomoncell.wordpress.com/4/6/2012](http://solomoncell.wordpress.com/4/6/2012)).

Thomas Peters dan Robert Waterman Jr. menyatakan delapan ciri organisasi yang unggul, yaitu:

1. *A Bias for Action*. organisasi lebih berkiblat pada aksi, dan tidak hanya berkuat dengan rencana. Prinsip organisasi ini adalah “*try it, do it and fix it*”. Organisasi yang lebih menghargai tindakan nyata daripada ambisi yang abstrak.

2. *Close to the stakeholder*. Organisasi yang memahami dengan baik apa yang diinginkan stakeholder-nya. ummat adalah “segala-galanya”. Bahkan, untuk keperluan memahami yang diharapkan, mereka tak segan-segan mendirikan dewan pembina, membuka layanan openhouse, melakukan riset-riset SDM, dan sejenisnya.

3. *Autonomy and Entrepreneurship*. organisasi menghargai sikap anggota yang berani untuk mandiri, memiliki pandangan orisinal, berani mengambil resiko, dan sejenisnya.

4. *Productivity through People*. organisasi menilai kader merupakan aset terpenting bagi organisasi, melebihi arti penting kekuasaan atau bangunan. kader dianggap sebagai pelaku (aktor) yang dewasa, yang bisa dipercaya dan memiliki kreativitas yang unik. Ada komitmen bahwa organisasi adalah aset terpenting yang terlihat dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan kader.

5. *Hands-on, Value Driven*. organisasi tak mengabaikan arti penting dari tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang, bahkan transedental. kader diyakinkan bahwa mereka tidak hanya bekerja untuk organisasi, tetapi juga untuk mencapai cita-cita yang luhur (superordinate goals). Mereka berusaha memberi makna transedental yang secara rutin dilakukan dalam organisasi.

6. *Stick to the Knitting*. Organisasi tidak tergesa-gesa dalam melakukan diversifikasi. organisasi belajar dari pengalaman, bahwa banyak organisasi terjebak dalam diversifikasi berlebihan. Organisasi memiliki bisnis inti (core business) yang jelas, dan tidak tergoda masuk ke perubahan pemikiran yang tidak dikuasainya dengan benar.

7. *Simple Form, Lean Staff*. organisasi memiliki struktur organisasi yang sederhana dengan jumlah staf yang ramping. Mereka menyadari bahwa organisasi besar biasanya kurang cepat atau kurang adaptif menghadapi perubahan di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, organisasi besar cenderung memiliki hirarki yang panjang, melakukan formalisasi, dan proses prosedural yang berlebihan. Organisasi yang sederhana dengan

sejumlah staf yang ramping dinilai penting untuk menjaga agar perusahaan tetap lincah dan cepat dalam mengambil keputusan.

8. *Simultaneous Loose – Tight Properties*. Organisasi memiliki kemampuan menjalankan konsep-konsep manajemen yang sepiantas terlihat bertentangan. Dalam konteks ini, organisasi mampu menyeimbangkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi dengan baik. (*elqorni.wordpress.com/24/04/2013*).

Kepopuleran persyarikatan muhammadiyah dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan memang sudah tidak diragukan lagi, bahkan diantara sekolah-sekolah negeri dan swasta, Muhammadiyah selalu menempati urutan pertama dalam kepercayaan masyarakat saat memilih sekolah bagi anaknya. Maka dari itu sudah sewajarnya dan selayaknya pendidikan Muhammadiyah menjadi solusi alternatif untuk mengurangi angka putus sekolah. Jika dahulu Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor pendidikan yang menjadi motor penggerak, maka sekarang Muhammadiyah harus berperan lebih dari pada itu, yakni Muhammadiyah kembali tampil sebagai aktor utama pemberantasan anak putus sekolah dan menjadi aktor yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam perjalanan pengelolaan pendidikan muhammadiyah hingga saat ini, banyak sudah mengalami berbagai macam hal yang membuat pasang surut. Kesemuanya itu bukan terjadi dikarenakan rendahnya kualitas dan rendahnya pengelolaan sekolah, melainkan banyak faktor yang menyebabkannya. Diakui atau tidak, pendidikan Muhammadiyah belum memiliki pedoman atau sistem pengelolaan pendidikan secara konseptual. Selama ini muhammadiyah baru sebatas berpedoman pada sebuah kepanjangan regulasi pemerintah dalam bidang pendidikan. Sehingga sistem pengelolaan pendidikan Muhammadiyah tidak mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Karena itu, setidaknya Muhammadiyah perlu merumuskan sistem pengelolaan pendidikan tersendiri untuk pendidikan Muhammadiyah yang nantinya menjadi acuan pola penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah secara keseluruhan.

Berangkat dari persoalan di atas, maka disinilah posisi penting penelitian ini, yaitu ingin mendeskripsikan secara lebih dalam mengenai sistem pengelolaan pendidikan muhammadiyah di Surabaya secara komprehensif. Hal itu bertujuan agar dapat dijadikan

contoh pengelolaan pendidikan muhammadiyah di daerah lain di Indonesia, terutama dalam upaya pemerataan pendidikan muhammadiyah yang unggul dan berdaya saing.

## **B. Kajian Pengelolaan Pendidikan Muhammadiyah**

Kajian tentang pengelolaan pendidikan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti atau akademisi. Namun demikian kajian yang berfokus terhadap pengelolaan pendidikan muhammadiyah secara khusus masih sangatlah jarang ditemukan. Berikut beberapa kajian tentang pengelolaan pendidikan yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti kajian yang dilakukan oleh Rokhim, *Peran organisasi muhammadiyah dalam bidang pendidikan di kecamatan sukorejo kabupaten kendal*. Dalam kajian tersebut diungkapkan bahwa keberadaan persyarikatan Muhammadiyah sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di kecamatan Sukorejo. Bagi organisasi Muhammadiyah sendiri diharapkan untuk makin merapatkan barisan dengan cara mengintegrasikan intern dan meningkatkan kerjasama antar amal usaha Muhammadiyah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan keilmuan tentang manajemen pengelolaan sekolah, serta penerbitan *siteplan* tentang garis-garis besar jangka panjang pengelolaan sekolah-sekolah Muhammadiyah. (Rokhim, 2014).

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Leny Marlina, *kajian terhadap perkembangan sekolah muhammadiyah*. Pada kajian tersebut dijelaskan bahwa Untuk mengejar ketertinggalan dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni para pemimpin, pengelola, dan pelaksana pendidikan pada sekolah-sekolah Muhammadiyah ini harus segera berbenah diri dengan memulai dari dalam manajemen sekolah Muhammadiyah itu sendiri. Mulai dari perencanaan program sampai pada pengevaluasiannya harus diatur sebaik mungkin. Beberapa langkah yang disarankan penulis ini juga didasarkan pada hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan sekolah Muhammadiyah itu, seperti pengangkatan guru benar-benar harus diperhatikan supaya guru-guru yang akan mengajar dan mendidik pelajar-pelajar di sekolah Muhammadiyah ini paham akan ke-Muhammadiyah-an. Selain itu, sarana dan prasarana belajar seperti gedung dan perangkat-perangkat lainnya tersedia dengan

lengkap mengingat pelaksanaan proses pendidikan itu tidak akan berjalan lancar jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal dana juga harus diperhatikan. Pihak lembaga atau pengurus organisasi sudah saatnya mencarikan dana untuk operasional sekolah supaya pihak sekolah tidak lagi hanya mengandalkan dana yang bersumber dari iuran siswa. Dalam hal alokasi waktu, para pengelola juga harus menyusun program dan mengatur alokasi waktu yang akan digunakan dalam menyampaikan beberapa pelajaran kepada siswa sehingga guru yang akan mengajar tidak merasa kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa serta pengkajian ulang terhadap orientasi pendidikan yang akan diseenggarakan.

Untuk Memenuhi tuntutan global saat ini, pendidikan Muhammadiyah perlu mereformulasi kembali konsep baru yang relevan dengan kebutuhan stakeholders, memunculkan ide-ide yang inspiratif, hingga strategi dan cara-cara inovatif untuk mengembangkan pendidikan. Dengan begitu pendidikan yang mengemban misi peradaban umat itu mampu melahirkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan pusaran zaman. Pendidikan Muhammadiyah sesungguhnya bukanlah pendidikan yang baru kemarin berdiri, melainkan telah mengarungi rentang masa yang cukup lama, yakni lebih dari satu abad lamanya. Bahkan, sebelum pendidikan nasional berkiprah, pendidikan Muhammadiyah telah lebih dulu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. (Leny Marlina, 2012).

Kajian yang dilakukan oleh Pudjo Sumedi, *Peran Pendidikan Muhammadiyah dalam pendidikan Non Formal*. Menjelaskan bahwa Persyarikatan muhammadiyah dalam melaksanakan amal usahanya melalui lembaga pendidikan muhammadiyah dalam bentuk dakwah islam, memang selalu berorientasi pada peningkatana pemberdayaan masyarakat indonesia sebagai masyarakat yang berguna, mandiri dan bermakna. Peran lembaga pendidikan muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan non formal antara lain ; (1) membantu program-prorgam pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul (2) dapat memperkuat persyarikatan muhammadiyah, untuk memperluas gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan (3) turut andil mengembangkan pendidikan untuk semua (*education for all*). (Pudjo Sumedi, 2010).

Kajian yang dilakukan oleh Yahya Mof, Alfian Khairani, Abdul Khaliq, *Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin*. Menjelaskan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai manajemen tersendiri dalam pengelolaan pendidikan, keberadaannya menjadi semakin dibutuhkan. Karenanya kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga harus dikembangkan secara sinergis, mengingat adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon Banjarmasin cukup beragam, yakni 1) partisipasi sebagai pengurus komite madrasah, 2) partisipasi dalam berbagai kegiatan- kegiatan di madrasah, dan 3) partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan madrasah. Strategi dan pendekatan yang telah dilakukan dalam rangka membina dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon Banjarmasin meliputi tiga hal yakni: 1) Identifikasi Masalah; 2) Perlakuan dan Pendekatan; dan 3) Pembinaan. (Yahya Mof, Alfian Khairani, Abdul Khaliq, 2013).

Kajian yang dilakukan oleh Cepi Safruddm Abd.Jabar, *Meneropong desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan kacamata politik pendidikan*. Menjelaskan bahwa Paradigma administrasi pendidikan yang menyaring dari sentralisasi ke desentralisasi membawa implikasi luas. Meski secara retorik memuat semangat nilai, minat, dan tujuan pendidikan yang tinggi, pada kenyataannya hal itu penuh dengan nilai-nilai politik dan minat. Jika aspek politik sebagai mayor, nilai pendidikan akan diabaikan. Desentralisasi pendidikan, yang saat ini diterapkan dalam sistem pendidikan kita, cenderung mengambil bentuk dekonsentrasi bahwa pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan fungsi manajemen pemerintah pusat. Berbagai keputusan mendasar di lapangan, dan nilai pendidikan, yang muncul dan berkembang dalam sistem pendidikan sesuai dengan pemerintah pusat. Desentralisasi pendidikan di Indonesia membutuhkan dukungan kelembagaan. Salah satu prinsip dasar desentralisasi adalah institusi yang bekerja secara demokratis. Prinsipnya dapat beroperasi jika masyarakat setempat siap menerima nilai-nilai demokrasi dan proses sosial dan politik tersedia yang membuat peran masyarakat

lokal lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan menuntut institusi pendidikan lokal lebih bertanggung jawab. (*Cepi Safruddm Abd.Jabar, 2006*)

Beberapa kajian di atas lebih mengungkapkan pengelolaan pendidikan pada lembaga umum non muhammadiyah, pengelolaan pendidikan partisipatif, dan pengelolaan pendidikan pada tataran parsial yang tidak komprehensif dan belum menyentuh pada sistem pengelolaan pendidikan muhammadiyah secara lebih mendalam serta menyeluruh. Maka pada penelitian ini akan difokuskan pada sistem pengelolaan pendidikan di persyarikatan muhammadiyah di Surabaya, yang dikhususkan pada SMA Muhammadiyah 2 dan SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Dengan membandingkan 2 sekolah muhammadiyah yang berbeda di Surabaya diharapkan dapat menghasilkan peta pengelolaan pendidikan yang komprehensif. Alasan fokus pada Muhammadiyah, disebabkan posisi Ormas Keagamaan (Muhammadiyah) mempunyai misi besar (*dakwah amar ma'ruf nahi mungkar*) dan jaringan lembaga pendidikan yang luas dan kuat dalam pembangun masyarakat yang baik (masyarakat Madani).

Dua Sekolah Menengah yang dijadikan objek penelitian yakni SMA Muhammadiyah 2 dan SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, Pemilihan Kedua Sekolah tersebut sebagai bahan studi pengelolaan Pendidikan menengah Muhammadiyah bukan tanpa alasan, *pertama* kedua sekolah sejak beberapa tahun terakhir berhasil memperoleh tingkat akreditasi A (Unggul), *Kedua*, Prestasi yang didapatkan oleh para siswa sangat menonjol baik dari sisi akademis ataupun non akademis, baik pada tingkat nasional bahkan tingkat internasional. *Ketiga*, Pengelolaan Pendidikan yang diterapkan pada kedua sekolah tersebut telah berbasis *school based management*.

SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang kemudian dikenal dengan Smamda, berada di jantung kota Surabaya. Smamda telah tumbuh dan berkembang selama lebih dari 40 tahun, melewati banyak tantangan dan menempa tradisi di sepanjang jalan. Smamda didirikan pada tanggal 1 Januari 1975 oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya di sebuah lokasi sempit, kumuh dan rawan banjir di tengah perkampungan di Jl Pucang Taman ½ Surabaya. (*website smamda.net*).

Smamda sendiri dibangun dan didirikan atas dasar pada beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek Agama, yaitu untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan Ilmu Pengetahuan.
2. Aspek Filosofis, bahwa lembaga yang dikelola Muhammadiyah selama ini masih jarang dan terkesan ketinggalan jaman.
3. Aspek Historis, bahwa Muhammadiyah semakin mendapat dukungan dari masyarakat luas.
4. Aspek Pendidikan, bahwa lulusan SPEMA melanjutkan pendidikannya di lembaga pendidikan umum.

Selain keempat aspek tersebut diatas Smamda juga mengusung nilai luhur yang kemudian dikemas menjadi sebuah budaya yang diterapkan di lingkungan sekolah, nilai luhur tersebut kemudian dikenal dengan singkatan DEDICATE, gabungan dari beberapa kata sebagai berikut :

#### 1. DISCIPLINE

Smamda menyakini bahwa kunci keberhasilan adalah disiplin, disiplin akan meningkatkan kualitas karakter. Kualitas karakter akan terlihat pada komitmen siswa, baik dalam beribadah, belajar, berorganisasi, maupun dalam bersosialisasi.

#### 2. CLEAN

Smamda memilih pilar kedua adalah bersih. Bukan hanya penerapan pada lingkungan namun juga terhadap aspek kehidupan sehari-hari, seperti bersih dalam pakaian, bersih bertutur kata serta bersih dalam perilaku.

#### 3. INDEPENDENT

Smamda menanamkan kemandirian pada siswa. Siswa memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, mengatasi masalah, percaya pada kemampuan diri sendiri dan mampu mengatur dirinya sendiri.

#### 4. FAIR

Smamda juga mencoba untuk senantiasa menanamkan sikap kejujuran sehingga terwujud pribadi yang jujur dan berbakat agar mampu berkompetisi secara nasional dan Internasional.

#### 5. CARE

Peduli adalah sikap memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang juga memerlukan bantuan orang lain. Peduli tidak selalu berarti memberi dalam bentuk fisik, tetapi meluangkan waktu bagi teman yang sedang membutuhkan pendampingan atau tutor sebaya juga merupakan sikap peduli terhadap sesama. Selain itu, peduli terhadap lingkungan juga sangat penting.

## 6. CREATIVE

Memberikan kesempatan untuk berkreasi, sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, melahirkan ide atau produk baru, dan mampu memanfaatkan peluang baru.

Sementara itu SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Smamseven beralamatkan di Jl. Sutorejo No. 98-100 Surabaya ini memiliki tiga tagline dengan sekolah IMAN yang digunakan untuk mengelola lembaganya. Smamseven merupakan Sekolah Menengah Atas swasta Muhammadiyah. Sekolah ini adalah sekolah IMAN (Sekolah Innovative Mandiri) yang mana dalam kegiatan belajar mengajar selalu mengajak peserta didik untuk selalu menerapkan nilai-nilai agama, mempunyai pola pikir innovative, dan bisa mandiri di era global yang sangat kompetitif

Tiga tagline tersebut yakni Iman (mengajarkan Mengajarkan nilai - nilai islam sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah), Inovatif (Peserta didik diperkenalkan dalam berorganisasi. Hal ini dapat menstimulus pola pikir kritisnya terhadap lingkungan sekitar, yang mana berperan penting untuk menghasilkan pemikiran - pemikiran yang inovatif), Mandiri (Pada era globalisasi saat ini, siswa dituntut untuk mempunyai kemandirian agar bisa berkompetisi. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan di Smamseven, siswa diajak untuk terlibat dan diberi tanggung jawab sehingga mereka terbiasa untuk tidak bergantung pada orang lain).

Baik SMAM 2 dan SMAM 7 memiliki segudang prestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Diantara prestasi dan pengakuan yang dimiliki oleh SMAM 2 dan SMAM 7 yaitu Terakreditasi A ( sangat memuaskan : 99,53 oleh BAS-S/M Prop. Jatim tahun 2008 ), Sebagai Sekolah RSBI oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjend. Manajemen dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, Sister School

dengan salah satu Sekolah di negara Bagian Victoria Australia, Kerjasama dengan Australia Indonesia Institute ( AII ), Kerjasama dengan Asia Education Foundation ( AEF ) Australia, dengan mengirim guru untuk magang di sekolah di Australia, Memiliki Gedung yang representatif dengan dilengkapi sarana belajar yang lengkap dan unggul, seperti : Laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, TIK, Ismuba, IPS, internet networking dengan Wi Fi, pembelajaran berbasis ICT; Pembinaan Leadership yang berkelanjutan, Entrepreneurship, Bersertifikasi ISO: 9001-2008 tentang standar pelayanan konsumen ( sekolah ) sejak November 2009, kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri ( Ashford University, RMIT University, Caldwell University).

Prinsip pengelolaan pendidikan menengah yang dilakukan oleh SMAM 2 dan SMAM 7 diawali dari semangat bahwa sekolah muhammadiyah diposisikan sebagai *center of excellence, agent of change* yang kemudian semangat tersebut diterjemahkan dalam beberapa perencanaan, implementasi dan evaluasi yang matang. Standarpengelolaan pendidikan masih mengacu pada standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan padatingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, ataunasional agar tercapaiefisiensi danefektivitas penyelenggaraan pendidikan. sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemberlakuan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 menjadi satu hal yang patut dipersiapkan dalam proses perencanaan. Dimana kurikulum di dalamnya ada program-program Ekstrakurikuler, Intrakurikuler. Setelah perencanaan kurikulum di tentukan sedemikian rupa maka selanjutnya adalah penyiapan sarana prasarana. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalani fungsi satuan pendidikan. Dalam Peraturan Mendiknas RI No 24 Th 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana dicantumkan bahwa sebuah Sekolah Menengah Atas minimal memiliki prasarana berupa : ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium biologi, kimia dan fisika, laboratorium komputer,

laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/ olahraga dengan sarana yang berbeda- beda pada tiap ruang. Kelengkapan, jumlah dan besar/luasnya sarana dan prasarana pada sebuah sekolah sangat tergantung pada sistem pendidikan, kegiatan serta jumlah pengguna di sekolah tersebut.

Proses Pembelajaran di SMAM 2 dan SMAM 7 setidaknya tercakup dalam beberapa ruang sebagaimana berikut :

#### 1. Ruang Belajar Akademis

Kelompok ruang belajar/akademis merupakan kelompok ruang yang berfungsi memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Kelompok ruang ini umumnya terdiri dari ruang kelas yaitu ruang kelas teoritis dan ruang kelas khusus, serta laboratorium yaitu laboratorium biologi, kimia, fisika, laboratorium komputer, dan bahasa.

#### 2. Ruang kelas

Berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori. Dimana banyaknya ruang kelas dalam sekolah minimum sama dengan jumlah rombongan belajar pada sekolah tersebut dengan kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik dan rasio minimum luas ruangan 2m<sup>2</sup>/peserta didik serta dengan lebar minimum 5 meter.

#### 3. Ruang Laboratorium.

Dalam pengelolaan sarana prasarana baik SMAM 2 dan SMAM 7 mulai melengkapisemua kelas dengan pendingin udara untuk kenyamanan, kemudian semua guru diberikemudahan untuk memiliki laptop atau perangkat elektronik lain agar memudahkan dalam proses belajar mengajar dan semua ruang belajar, ruang pertemuan, ruang rapat dilengkapi dengan LCD Projector.

Dari sisi pengelolaan dakwah, dua sekolah tersebut senantiasa melibatkan siswa-siswinya dalam kegiatan ke-Islaman seperti kegiatan ibadah Ramadhan, Muharam, Dzulhijah baik di dalam maupun diluar Surabaya. Pembiasaan diri melakukan pengajian kelas ketika menjadi siswa, terbawa ketika studi diluar negeri atau berkarir diluar negeri.

Pengelolaan evaluasi dan peningkatan mutu juga turut menjadi perhatian bagi kedua sekolah, dengan cara mengirimkan guru-guru dari berbagai mata pelajaran ke mengikuti kursus-kursus sesuai dengan mapelnya, ikut sertadalam pembuatan perangkat mengajar dalam bahasa Inggris, bahkan selanjutnya guru-guru diikutkan ujian sertifikasi TKT (Teaching Knowledge Test) untuk memperoleh sertifikat. Pemberian kesempatan guru guru untuk studi S2 keberbagai perguruan tinggi negeri dan swasta baik dalam maupun luar negeri dengan biaya sekolah, beasiswa dari instansi pemerintahan maupun mandiri.

Selain daripada itu tantangan lain yang harus dihadapi oleh kedua sekolah tersebut yakni adanya Globalisasi, Ketidakpastian, Kompetensi dan Politisasi Pendidikan. Keempat komponen tantangan tersebut harus disiapkan sedemikian rupa, agar proses pengelolaan yang sudah direncanakan matang sejak awal, dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.

Dari beberapa data diatas dapatlah ditarik benang merah bahwa untuk memulai perbaikan dan pembenahan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya difokuskan pada pihak tertentu saja, akan tetapi banyak pihak yang harus turut andil di dalamnya, seperti pihak pengurus, pengelola, pelaksana, dan bahkan pihak Pemerintah pun harus turut andil mendukung program yang diselenggarakan sekolah-sekolah Muhammadiyah. serta menganggap sekolah Muhammadiyah ini sebagai mitra atau bagian dari sekolah yang bernaung di bawah Pemerintahan Indonesia. Sudah saatnya meninggalkan dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta umumnya baik itu yang bernaung di beberapa organisasi tertentu maupun bernaung di bawah yayasan apapun.

Akhirnya, mari bersama memulai pembangunan dan pengembangan sekolah Muhammadiyah ini dengan membuang jauh keegoisan, kemalasan, dan ketidakpedulian terhadap sekolah-sekolah muhammadiyah serta jangan lupa semangat dan rasa memiliki itu tetap harus dijaga dan dipertahankan demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah-sekolah muhammadiyah dimanapun.

### **C. Kesimpulan**

Dari hasil riset yang dilakukan oleh tim peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah surabaya bersumber pada 3 pokok utama yaitu sekolah muhammadiyah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan dan unggul sebagai *center of excellence*, sebagai *agent of change*, dan sebagai kebun ilmu tempat siswa menuntut ilmu.
2. Lingkup pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah meliputi beberapa hal berikut : Aspek manajemen, aset yang dimiliki, pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum, Proses pembelajaran, Evaluasi, Sarana dan prasarana, dan penataan lingkungan.
3. Alur pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah diawali dari peserta didik yang kemudian melalui tahapan proses pembelajaran ( Pendidik, Kurikulum, Bahan Ajar, Sarana Prasarana, Pendanaan Pendidikan dan Peran Masyarakat ) dengan keterlibatan 6 komponen tersebut dalam proses akan menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul.
4. Tantangan pengelolaan pendidikan menengah muhammadiyah terangkum dalam empat hal yakni Globalisasi, Ketidakpastian, Kompetensi dan Politisasi Pendidikan.

### Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chatlinas Said, (1988), *Pengantar Administrasi Pendidikan*, Jakarta :Depdikbud.
- Donmoyer, Robert and associates (Eds), (1995), *The knowledge Base in educational administration*, Albany : State University of New York Press.
- Douglass, Hart R., (1963), *Modern Administration of secondary*, Boston: Ginn & Company
- Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri, (1994), “*Wawasan Dasar Pendidikan dan Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan*”, dalam *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Jurusan Adpend.
- Effendi, Sofian. (2011). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S
- Elsbree, Willard S., H.J. Mc Nally and R. Winn, (1959), *Elementary School Administration*, New York:American Book Company
- Hack, Walter G, et.al., (1968), *Educational Administration*, Selected Reading, Boston: Allyn & Bacon, Inc
- Hakim, Atang A.(2008). *Filsafat Umum: Dari Metologi sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia.

- Hoy, Wayne K dan Cecil G. Miskel, (1981), *Educational Administration: Theory, Research And Practice*, Toronto : Random House, Inc.
- Jabar, Cipi Safruddm Abd. (2006). *Jurnal Manajemen Pendidikan*. “Meneropong desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan kacamata politik pendidikan”. Volume 1, Nomor 3, April.
- Khaliq, Yahya Mof, Alfian Khairani, Abdul, (2013). *Jurnal Tashwir*. “Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin”. Volume 1, Nomor 2, Juli.
- Lipham, James M. and James Hoek Jr., (1974), *The Principalship, Foundation and Functions*, New York: harper and Row, Publisher.
- M. Moh. Rifai, (1982), *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Jemmars.
- Marlina, Leny. (2012). *Jurnal Ta'dib*. “Kajian terhadap perkembangan sekolah muhammadiyah”, Volume 17, Nomor 1, Juni.
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musaazi, J.C.S., (1988), *The Theory and Practice Of Educational Administration*, London : Macmillan Publishers Ltd.
- Oteng Sutisna, (1983), *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Bandung : Angkasa.
- Raymond H. Ostrander and Dethy, Ray C., (1968), *A Value Approach to Educational Administration*, New York: American Book Company.
- Rokhim. (2014). *Jurnal Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang*, “Peran Organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di kecamatan sukorejo kabupaten kendal”, Volume 2, Nomor 1, Nopember.
- Scott M., Cultip and Center, Allen H., (1958), *Effective Public Relations*, New York: Englewood Cliffs Prentice Hall Inc.
- Sumedi, Pudjo. (2010), *Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah Di Tengah Persaingan Nasional dan Global*, Jakarta : Uhamka Press.
- Terry, George, (1960), *Principles of Management*, Home-wood Illionis: Richard D. Irwin
- Wayne K., Hoy and Miskel, Cecil G., (1978), *Educational Administration, Teory, Research and Practice*, New York: Random House

### **Media Cetak**

[republika.com/2/08/2015](http://republika.com/2/08/2015), diunggah tanggal 2/08/2015.

[kompasiana.com/13/04/2013](http://kompasiana.com/13/04/2013), diunggah 13/04/2013.

[solomoncell.wordpress.com/4/6/2012](http://solomoncell.wordpress.com/4/6/2012). diunggah tanggal 4/6/2012.

[elqorni.wordpress.com/24/04/2013](http://elqorni.wordpress.com/24/04/2013), diunggah tanggal 24/04/2013.